

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pulau Madura adalah salah satu pulau yang termasuk di dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pulau ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Masyarakat Madura dikenal juga memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Istilah khas disini menunjukkan bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan - kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain. Kekhususan - kultural ini antara lain tampak pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka kepada empat figur utama dalam kehidupan yaitu *Buppa, Babu, Guruh, dan Ratoh* (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin Pemerintahan).

Mayoritas masyarakat suku Madura adalah penganut Islam. Suku Madura terkenal sangat taat dalam beragama Islam. Apalagi dengan adanya pondok pesantren yang tersebar di seluruh pulau Madura.

Kyai di Madura mempunyai peran penting dalam masyarakat. Di antara peran sosiokultural yang paling dominan yaitu sebagai pemimpin keagamaan dan ustadz yang mengajarkan agama Islam kepada santri dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sebagai pemuka agama Islam, mereka seringkali menjadi pemimpin ritual keagamaan, seperti syukuran, membaca tahlil.

Berdasarkan peran sosiokultural keagamaannya, Kyai dapat digolongkan sebagai kelompok elite dalam komunitas masyarakat muslim. Kemunculan Kyai sebagai elite sosiokultural dalam masyarakat sangat terkait dengan wacana dan praktik keislaman yang disebarkan melalui jaringan ulama atau Kyai. Percampuran nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat pesisir Madura turut mewarnai corak keislaman masyarakat yang ada.

Berbeda dengan organisasi birokratis jabatan atau jabatan dalam kenegaraan struktur khraismatik tidak mengenal bentuk pengangkatan maupun pemecatan yang tercatat atau terstruktur rapi, hal ini juga tidak mengenal jenjang karir gaji dan lain sebagainya. Hampir di seluruh kepulauan Madura, Kyai tidak hanya mempunyai kekuasaan secara kultural, akan tetapi juga mempunyai kekuasaan struktural, seperti jabatan dalam pemerintahan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Bupati. Dengan demikian, kekuatan kharismatik yang dimiliki oleh Kyai melalui pengaruh sosiokultural akan semakin lengkap dengan adanya penguasaan terhadap kekuatan struktural yang dimilikinya. Kondisi ini tidak hanya dapat menciptakan praktik hegemoni melalui otoritas moral keagamaan yang dimiliki oleh Kyai, tetapi juga lebih dari itu, akan mematikan tumbuh berkembangnya dinamika elite lokal. Dengan kekuasaannya itu, Kyai dengan leluasa melakukan dakwa keagamaan dan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat (Zamroni, 2012:39-40).

Status Kyai di masyarakat Madura sangat disegani, terbukti dengan dipatuhinya ucapan dari para Kyai. Era Orde Baru, Kyai merupakan figur yang sangat kuat dan eksistensinya sangat diperhitungkan oleh kalangan politisi lokal.

Jika seorang Kyai sudah menentukan dukungannya terhadap partai politik tertentu, maka secara otomatis semua orang yang ada di sekitarnya—keluarga, santri, wali santri, alumni pesantren dan masyarakat—akan menjatuhkan pilihan yang sama dengan Kyai mereka. Mereka seolah-olah *anut grubyuk* (hanya mengekor saja) tanpa diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Pilihan dari Kyai sudah dianggap sebagai pilihan yang terbaik. Terlebih jika seorang Kyai itu telah melontarkan fatwa bahwa telah dilakukan ikhtiar religius seperti sholat istikhoroh. Pada era orde baru Negara tidak hanya dibentuk dengan sistem yang sangat sentralistik, akan tetapi situasi politik di Madura juga mengarah pada sentralisasi kekuasaan Kyai. Kekuasaan struktural Orde Baru yang begitu dominan menjadikan perpolitikan di Madura tidak berkembang dengan baik. Begitu pula dengan dominasi kultural-religius mengakibatkan masyarakat tidak mandiri secara politik selama bertahun-tahun lamanya (Zamroni, 2012:42).

Harga diri, juga paling penting dalam kehidupan orang Madura, mereka memiliki sebuah peribahasa *lebbi bagus pote tollang, atembang pote mata*. Artinya, lebih baik mati (putih tulang) daripada malu (putih mata). Sifat yang seperti ini melahirkan *carok* pada masyarakat Madura.

Ada perbedaan antara Sumenep-Pamekasan dengan Sampang-Bangkalan. Masyarakat Sumenep-Pamekasan jauh lebih halus dalam bertutur bahasa dan bertata karma berbeda dengan masyarakat Sampang-Bangkalan dimana mereka lebih kasar didalam bertutur kata dan bertata krama. Dan setiap daerah juga memiliki perbedaan dimana tanah di daerah Sampang dan Bangkalan lebih

gersang dibandingkan dengan daerah Pamekasan dan Sumenep dimana daerah ini tanahnya lebih subur.

Di dalam masyarakat Madura Islam Sunni lebih mendominasi dibandingkan dengan Islam Syiah. Madura memang kental dengan keagamaanya. Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir. Lebih dari 1000 tahun Syiah mengalami perjalanan sejarah, tidak serta merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Sepanjang sejarah itu, konflik Syiah selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda dengan segala pernik persoalan. Mengenai kapan Syiah itu muncul, juga mengalami pertentangan. Ada yang menilai bahwa Syiah sebenarnya adalah kelompok pecahan Islam buatan orang Yahudi, Abdullah bin Saba". Abdullah bin Saba" sang Yahudi dituduh sengaja membentuk kelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam (Hasim, 2012:24).

Sampang adalah salah satu kota di pulau Madura. Bukan rahasia umum jika watak atau karakter dari masyarakatnya identik dengan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Meskipun sebenarnya tidak semua warganya memiliki watak seperti itu. Masyarakat Madura dikenal sebagai tukang *carok*. Pada dasarnya *carok* dimadura bukanlah suatu kebiasaan. Banyak orang yang membenci dan mengecam kejadian ini. Namun hal ini merupakan jalan tercepat untuk menyelesaikan masalah dimana emosi yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Meskipun merugikan namun masih tetap ada orang-orang yang melakukan hal ini dalam masalah keluarga, wanita, kepercayaan, balas dendam dan berbagai alasan lain. Merekapun rela mengorbankan nyawa untuk itu.

Sejak zaman dahulu hal itu memang menjadi sejarah di pulau yang terkenal dengan sebutan pulau garam ini. Memang Madura sudah di lambangkan dengan kekerasan dalam masyarakat kebanyakan. Tidak sedikit pula konflik-konflik yang membawa nama Madura entah itu di Madura ataupun diluar Madura. Entah itu terjadi karena ulah orang Madura itu sendiri ataupun hanya membantu teman. Misal konflik disampit, *carok* massal dipamekasan, pemilu 1998, Sunni Syiah yang sempat menjadi perbincangan hangat di media.

Sunni Syiah terjadi di kabupaten Sampang tepatnya di desa Karang Gayam dan desa Blu"uran Omben. Peristiwa itu terjadi beberapa kali namun puncaknya terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012. Banyak kerugian yang ditanggung dari peristiwa tersebut, baik secara materi maupun korban jiwa.

Sunni Syiah adalah konflik yang berasal muasal dari masalah keluarga yang membesar. Dikarenakan kalangan yang berkonflik adalah tokoh-tokoh terkemuka di daerah tersebut. Keduanya adalah Kyai yang memiliki pesantren dan tentu saja memiliki massa yaitu dari kalangan para santri dan penganut mereka masing-masing. Akan tetapi tidak hanya disebabkan oleh masalah tersebut sehingga konflik bisa menjadi sebesar ini. Beberapa faktor terjadinya konflik adalah:

Pertama, karena adanya fatwa dan seruan MUI Jatim, PWNNU Jatim, dan ulama bassara yang menyatakan Syiah sebagai aliran sesat sehingga penganut harus kembali kejalan yang dianggap benar dan dalam hal ini Sunni yang dianggap aliran benar dan tidak menyimpang.

Kedua, adanya sebuah pernyataan dari Bupati Sampang periode 2007-2012, yang menyatakan penolakan atas keberadaan masyarakat penganut Syiah di

wilayahnya yaitu kabupaten Sampang, karena dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan kebenaran atau dianggap sesat.

Ketiga, putusan pengadilan negeri Sampang dan pengadilan tinggi yang menyatakan Tajul Muluk merupakan tokoh Syiah dianggap telah melakukan penistaan agama, kemudian yang bersangkutan dihukum pidana penjara 2 tahun. Namun Tajul merasa hal ini tidak adil, sehingga dia mengajukan banding. Dan dalam proses banding, Pengadilan Tinggi memperberat hukumannya menjadi 4 tahun penjara.

Keempat, konflik pribadi antara Tajul Muluk yang merupakan tokoh Syiah dengan Ro'is yang merupakan pemimpin Sunni di daerah tersebut dan diikuti oleh masing - masing pengikut secara berkepanjangan.

Kelima konflik ini terjadi berdekatan dengan pemilihan umum kepala daerah Sampang, bupati Sampang terdahulu, menggalang masa serta suara dari masyarakat Sunni, sehingga menjadi salah satu faktor meledaknya konflik.

Konflik antara penganut Syiah dan Sunni di Sampang bersifat kompleks, dan multi dimensional. Faktor sosio-kultural, agama, ekonomi dan politik turut mendorong terjadinya konflik itu. Ketegangan yang ada di dalam komunitas antara kelompok Sunni dan Syiah, konflik individu di dalam keluarga, pertarungan politik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional turut pula mempengaruhi eskalasi konflik tersebut. Seluruh situasi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dalam konteks pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik di tingkat lokal maupun nasional (Semendawai, 2013:28).

Konflik ini juga terjadi mendekati pemilihan umum kepala daerah. Persaingan politik pemilukada juga berpengaruh dalam memperpanas masalah Syiah Sunni yang sedang berlangsung. Hal ini didukung dengan adanya yang mengangkat permasalahan Syiah-Sunni oleh salah satu kontestan dalam pemilihan kepala daerah pada periode sebelumnya. Hal ini dimanfaatkan untuk mencari dukungan politik.

Pemilihan umum kepala daerah Sampang berlangsung pada 12 Desember 2012, beberapa minggu setelah konflik terjadi. Di tengah masyarakat daerah tersebut mudah memberi cap kepada orang lain yang tidak sepaham sebagai orang kafir dan aliran sesat, seperti Tajul muluk dengan Syiah di pesantrennya. Dan akhirnya ledakan konflikpun tidak bisa dibendung. Ledakan konflik itu dapat terjadi karena kurangnya keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan yang ada. Benar saja konflik itu tidak langsung terjadi begitu saja. Banyak informasi mengatakan sebelum konflik itu terjadi besar, ada hal-hal atau indikasi akan terjadinya pertikaian itu.

Akibat terjadinya konflik yang akhirnya memaksa warga Syiah untuk direlokasi dari kampung halamannya di Karang Gayam dan blu'uran ke Gelanggang Olah Raga Sampang. Akan tetapi setelah beberapa bulan mereka dipengungsian, mereka direlokasi secara paksa keluar Madura. Ini terjadi karena banyaknya massa diluar yang mengepung tempat ini. Massa tersebut awalnya datang berniat untuk mengikuti istigosah yang lokasinya tidak jauh dari tempat pengungsian warga Syiah, namun akhirnya mereka datang ke tempat pengungsian dan meminta warga Syiah keluar dari Sampang. Beruntung kepolisian sudah siap

untuk mengatasi masalah ini. Sehingga massa yang berkerumun diluar tempat pengungsian tidak dapat masuk kedalam. Mereka mengecam para korban untuk keluar dari Sampang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Faktor politik apa yang menjadi pemicu konflik antara penganut Syiah dan penganut Sunni ?
2. Apa keterkaitan antara konflik penganut Sunni Syiah dan pemilihan umum kepala daerah Sampang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan faktor politik yang menjadi pemicu konflik antara penganut Syiah dan penganut Sunni.
2. Menganalisis keterkaitan antara konflik penganut Sunni Syiah dan pemilihan umum kepala daerah Sampang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian tentang konflik yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Sampang ini diharapkan menjadi suatu referensi bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten Sampang dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada konflik tersebut. Sebagai alat bantu informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang konflik dan politisasi kelompok kepentingan.

I.5 DEFINISI KONSEP

1.5.1 Konsep Negara

Negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik, serta organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dengan ini negara mempunyai dua tugas:

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan;
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-

kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri (Budiardjo, 2009:47-48).

1.5.2 Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia Robert M. Mclver mengatakan “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of ordered relation*).

Anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya masyarakat etnis atau suatu masyarakat yang lebih luas *nation state* seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama dan/atau etnis.

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; disatu pihak ia ingin bekerja sama, di pihak lain ia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat disekelilingnya, Harold laswell merinci delapan nilai yaitu :

- a. Kekuasaan
- b. Kekayaan
- c. Penghormatan
- d. Kesehatan
- e. Kejujuran
- f. Keterampilan
- g. Pendidikan
- h. Kasih sayang

Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus (Budiardjo, 2009:46-47).

1.5.3 Konsep Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai suatu perkelahian, peperangan ataupun perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak (Webster, 1966). Namun hal tersebut dapat berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam dan mengganggu dari pihak lain atas beberapa kepentingan, ide dan lain – lain. Dan juga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak – pihak lain tidak dapat dicapai sehingga

terjadilah konflik. Kepentingan merupakan perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya mereka inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya (Raven dan Rubin, 1983).

Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Dan beberapa kepentingan bersifat spesifik bagi beberapa pelaku – pelaku tertentu. Beberapa kepentingan bersifat lebih penting dari pada kepentingan lain atau biasa disebut dengan prioritas kepentingan.

Sebelum kepentingan satu pihak bertentangan dengan pihak lain, kepentingan tersebut harus sudah menjadi suatu aspirasi yang didalamnya merupakan isi dari tujuan – tujuannya. Aspirasi ini harus tidak sesuai dengan aspirasi pihak lain. Sumber sumber utama kekakuan aspirasi yaitu :

1. Nilai – nilai yang sangat penting mendasari aspirasi tersebut. Termasuk didalamnya adalah nilai – nilai yang berkaitan dengan rasa aman, identitas, dan pengakuan dari banyak orang atau bahkan mungkin oleh seluruh Negara di dunia.
2. Tata nilai yang mendasari aspirasi adalah pilihan memperoleh atau tidak, maksud dari kata – kata tersebut adalah pilihan yang ada antara mampu mendapatkannya atau tidak.

Konflik dapat terjadi ketika tidak adanya alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak memiliki aspirasi yang tinggi dan karena tidak ditemukan alternatif yang bersifat integratif. Ada tiga determinan penyebab konflik, yaitu: Tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi satu pihak atas aspirasi pihak lain, dan tidak ditemukannya alternatif yang bersifat integratif.

Determinan tingkat aspirasi: aspirasi bangkit dan kemudian menghasilkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan suatu obyek bernilai untuk diri mereka sendiri atau percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut. Pertimbangan pertama bersifat realistis, sedangkan yang kedua bersifat idealistis. Masing – masing pertimbangan dapat timbul melalui bermacam – macam cara.

Prestasi masa lalu merupakan salah satu pertimbangan realistis yang penting, apa yang telah dicapai dimasa lalu, aspirasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan jatuh ketika prestasi menurun. Ini disebabkan karena orang lebih merasa berpengharapan ketika segala sesuatu bertambah buruk. Hal ini tidak menimbulkan masalah selama hal ini masih didalam seputar prestasi. Namun terkadang suatu kesenjangan revolusioner berkembang. Aspirasi meningkat dengan begitu cepatnya sehingga tidak ada alternatif nyata yang mampu memuaskannya, sehingga dapat terjadi konflik.

Aspirasi juga cenderung meningkat untuk alasan-alasan yang realistis, ketika orang berhadapan dengan seseorang ataupun sekelompok yang dirasa

memiliki sumber – sumber dayanya dianggap berharga dan tampak lebih lemah dari pada dirinya sendiri. Orang biasanya membuat rasionalisasi terhadap eksploitasi ini untuk meredakan rasa bersalahnya. Konflik akan terjadi ketika ada ambiguitas mengenai sifat kekuasaan sehingga masing – masing pihak dapat menyimpulkan melalui proses pemikiran yang penuh harap bahwa pihaknya lebih kuat dari pada pihak lain.

Masyarakat dan kelompok – kelompok yang terlibat didalamnya secara konstan mengembangkan berbagai aturan untuk mengatur perilaku para anggotanya. Aturan yang lebih luas dan berlaku lebih lama dapat dikatakan adalah suatu norma. Fungsi utama aturan - aturan tersebut adalah untuk mengantisipasi aspirasi pihak – pihak oposan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik (Thibaut dan Kelley, 1959).

Perbandingan dengan orang lain seperti pendapat Gurr (1970) efek demonstrasi seringkali mendasari banyak kekerasan yang bersifat politis. Orang – orang cenderung mengidentifikasi diri dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan atau memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompok yang diikutinya. Bila kelompok tersebut berprestasi lebih baik atau lebih maju dari kelompoknya sendiri, hal seperti inilah yang mampu menstimulasi terjadinya peningkatan aspirasinya sendiri, yang kemudian akan mengarah pada terjadinya konflik.

Ketika beberapa orang memiliki kepentingan yang sama dan saling berkumpul, maka kepentingan mereka akan muncul ke dalam kesadaran mereka. Dan mereka akan saling berusaha untuk meyakinkan keyakinan

yang mereka miliki. Setelah merasa yakin dengan keyakinan yang mereka yakini, mereka akan saling mengembangkan aspirasi baru yang dapat berkembang kearah konflik dengan orang lain yang memiliki keyakinan bertentangan dengan aspirasi mereka. Konflik semacam ini akan muncul bila mereka mengidentifikasi diri sebagai kelompok yang berbeda dari kelompok lainnya. Aspirasi yang sama tersebut kemudian akan berubah menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok. Hasil dari kejadian ini dapat disebut dengan *struggle group* atau kelompok pejuang. Tiga kondisi yang dapat mendukung berdirinya *struggle group* yang seringkali menjadi pendorong terjadinya konflik adalah : 1.) Komunikasi terus – menerus diantara orang - orang senasib, 2.) Adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok, dan 3.) Legitimasi kelompok dimata komunitas yang lebih luas, atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok (Dahrendrof, 1959).

Determinasi persepsi tentang aspirasi pihak lain. Hanya karena memiliki aspirasi yang tinggi semata – mata tidak cukup untuk melibatkan orang di dalam konflik. Suatu pihak harus percaya bahwa pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak mencapai aspirasi masing – masing. Bila aspirasi pihak lain rendah atau bersifat fleksibel, maka aspirasi tadi tidak akan dianggap suatu

ancaman bagi pihak atau kelompok tersebut, sehingga tidak akan terjadi konflik.

Tidak adanya alternatif yang bersifat integratif. Memiliki aspirasi yang tinggi dan berkeyakinan bahwa pihak lain memiliki aspirasi yang tinggi juga adalah aspek yang diperlukan bagi persepsi mengenai konflik kepentingan, tetapi itu semua masih belum cukup. Suatu pihak harus memiliki persepsi bahwa aspirasi kedua belah pihak tidak kompatibel dengan yang lain. Ini adalah masalah persepsi mengenai alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai suatu keadaan yang sanggup diterima semua kalangan. Pada suatu saat tampaknya tidak ada alternatif yang mungkin akan berhasil dicapai oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuannya meskipun harus dengan membebankan kerugian pada pihak lainnya.

Perbincangan tentang keterkaitan agama dengan masalah-masalah keduniawian telah banyak menjadi faktor-faktor terjadinya kontroversi. Dalam hal ini minimal ada dua pandangan yang sangat berbeda dan saling bertolak belakang. Pandangan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari masalah-masalah keduniaan, sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Seharusnya antara agama dan masalah keduniaan memiliki kaitan yang formal. Dan pandangan bahwa bukan saja agama itu berbeda dengan persoalan keduniaan, namun antara keduanya memang tidak saling berhubungan dan arena itulah keduanya harus dipisahkan. Kehidupan

agama tidak bisa dicampurkan dengan kehidupan dunia. Agama merupakan permasalahan pribadi dan membutuhkan ruang privasi tersendiri.

1.5.4 Konflik dan Proses Politik

Konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses “penyelesaian” konflik politik yang tidak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi tahap politisasi dan/atau koalisi. Tahap pembuatan keputusan dan tahap pelaksanaan integrasi (Conn,1971).

Apabila dalam masyarakat terdapat konflik politik di antara berbagai pihak, dengan segala motivasi yang mendorongnya maka masing-masing pihak akan berupaya merumuskan dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Agar tuntutan mendapat perhatian dari pemerintah, lalu para kontestan akan berusaha mengadakan politisasi. Artinya memasyarakatkan tuntutannya melalui berbagai media komunikasi sehingga menjadi isu politik. Dengan kata lain, menjadi bahan pembicaraan di kalangan pengemuka pendapat (*opinion leader*) maupun dikalangan pemerintah. Dalam tahap ini setiap kontestan akan mengadakan perhitungan mengenai cara yang paling efektif untuk memperjuangkan tuntutannya. Hal ini perlu dipertimbangkan karena untuk memperjuangkan suatu tuntutan jelas memerlukan dana, waktu, keterampilan, strategi, dukungan massa (Surbakti,1992:164).

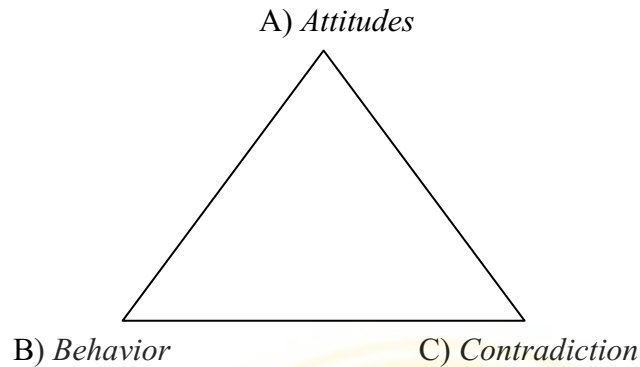
1.6 TEORI KONFLIK SOSIAL

Johan Galtung menginterpretasikan konflik pada tiga komponen, yaitu *A(attitude)*, *B(behavior)*, dan *C(contradiction)* (dalam Czyz, 2006). Terdapat rumusan dalam berlangsungnya konflik, yaitu: $C(\text{conflict}) = A(\text{attitudes}) + B(\text{behavior}) + C(\text{contradiction})$. Galtung membuat teori ini menjadi sebuah model segitiga ABC yang diambil dari ketiga komponen konflik. Urutan dari ketiga komponen konflik tersebut dimulai dari adanya kontradiksi, sehingga urutannya adalah sebagai berikut: $C \rightarrow \text{Contradiction}$ (kontradiksi/pertentangan), $A \rightarrow \text{Attitude}$ (sikap), dan $B \rightarrow \text{Behavior}$ (perilaku) (dalam Webel dan Galtung, 2007:22).

Model segitiga ABC konflik ini pada awalnya dimaksudkan untuk diterapkan pada situasi perang, di mana ada yang berbeda dan bertentangan pihak. Namun, Galtung (dalam Czyz, 2006:6) memiliki pemikiran bahwa model ini juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik-konflik lain, seperti kekerasan keluarga, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik di sekolah.

Secara umum, metode yang digunakan dalam menangani konflik bersifat merusak atau kekerasan. Namun, dengan adanya pemikiran orang banyak yang menganggap bahwa setiap konflik selalu berakibat kekerasan, Galtung mencetuskan sebuah teori yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana konflik itu berlangsung.

berikut gambar segitiga konflik ABC Galtung.



(Johan Galtung, dalam Czyz, 2006:6) Galtung (dalam Weibel and Galtung, 2007:22) berpendapat bahwa urutan terjadinya konflik yaitu: $C \rightarrow A \rightarrow B$, konflik dimulai secara obyektif dari dua pihak, mengambil bagian dalam pelaku konflik, dan menemukan sesuatu dari luar, ekspresi perilaku, baik secara lisan atau fisik, kekerasan, atau tidak dengan kekerasan. Tetapi tidak menuntut kemungkinan urutan ABC yang lain juga dapat digunakan dan bersifat empiris. Hal tersebut dikarenakan ketiga komponen saling berperngaruh satu sama lain.

Berikut penjabaran ketiga unsur dalam segitiga konflik ABC Galtung :

- a. *Contradiction* (kontradiksi) adalah pertentangan tajam yang muncul pada konflik. Kontradiksi merupakan akar dari munculnya konflik.
- b. *Attitude* (sikap) adalah sikap yang mengacu pada asumsi, kognisi dan emosi yang satu pihak tentang pihak lainnya.
- c. *Behavior* (perilaku) diartikan sebagai ekspresi ketika konflik terjadi baik secara verbal atau fisik (dalam Czyz, 2006:6-7).

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan secara langsung, dimana para peneliti turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, situasional deskriptif, interview mendalam. Penelitian Kualitatif pada dasarnya meliputi observasi, wawancara mendalam (Hamidi,2008). Ini ditujukan agar peneliti mengerti, memahami, dan menghayati pada obyek yang ditelitinya. Pendekatan kualitatif bersifat continue dan banyak arah, suatu interaksi yang dipetakan dan masing-masing berupa sebab dan akibat. Proses sebab akibat adalah suatu kelanjutan dari proses sistem model atau paradigma tertentu, melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk diri saya sendiri selaku peneliti subyektif. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk dapat memahami dengan cermat fenomena sosial tertentu melihat realitas ganda, hasil kontruksi dalam pengertian holistik. Ada substitusi situasi dan mutual dan tumpang tindih. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dengan cermat terhadap fenomena sosial.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang. Dikarenakan konflik Sunni Syiah terjadi di lokasi tersebut.

1.7.2 Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah individu atau pihak yang terlibat dalam konflik Sunni Syiah di Kota Sampang. Karena jenis penelitian ini bersifat kualitatif, diperlukan kriteria - kriteria umum yang dimiliki oleh

informan, diantaranya adalah pihak - pihak yang terlibat ataupun pihak – pihak yang dianggap mengetahui secara mendalam dalam konflik ini sebagai informan kunci dengan cara pemilihan informan secara selektif untuk mengetahui informan kunci. Oleh karena itu dalam penelitian ini subjek penelitian merujuk pihak - pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Peneliti akan menetapkan beberapa narasumber yang mungkin menjadi informan kunci dalam berbagai dinamika konflik.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan cara: *Pertama*, melakukan wawancara dengan menggunakan seperangkat interview guide untuk mendapatkan gambaran umum tentang konflik yang terjadi di Lokasi penelitian. Interview guide sebagian besar merupakan pertanyaan yang terbuka sehingga peneliti bebas menanyakan sampai yang terdalam mengenai permasalahan yang ditanyakan untuk memperoleh jawaban yang benar-benar merepresentasikan permasalahan penelitian. Interview guide digunakan dalam memahami pola-pola dalam asumsi-asumsi atau preposisi yang berkait dengan karakteristik masyarakat dilokasi tersebut.

Wawancara secara mendalam dilakukan kepada masyarakat yang ikut terlibat didalam konflik tersebut secara sengaja, sehingga diharapkan mampu mewakili secara lebih luas tentang gambaran kondisi realitas yang nampak maupun tersembunyi, sementara data sekunder diperoleh dari pihak

laporan penelitian, jurnal, artikel, badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol).

1.7.4 Jenis Data

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang di dapat oleh peneliti, yang pertama adalah data – data utama atau primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini.

1.7.4.1 Data primer

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan – pertanyaan pokok utama yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

1.7.4.2 Data sekunder

Data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berrbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen – dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data sekunder juga bisa berupa Koran harian, publikasi, skripsi terdahulu, tesis, hasil survei dan sebagainya.

1.7.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan merupakan cara menentukan sampel yang dalam penelitian kualitatif disebut informan. Dalam penelitian konflik Syiah Sunni ini sampel diambil secara teratur dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, sehingga sampel memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan panduan petunjuk wawancara dimana sampel diambil dari beberapa kajian berdasarkan pertimbangan yang tidak acak dan subyektif.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Mentranskrip hasil wawancara sesuai panduan wawancara tanpa menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan yang ada menjadi lebih luas dan lebar dengan harapan memperoleh data-data yang lebih akurat dan mampu mengungkap makna dibalik realitas yang diperoleh. Dari gambaran umum tersebut kemudian dilakukan pemilihan atau klasifikasi, dan diperoleh klasifikasi seperti tindakan apa yang dilakukan oleh para pelaku konflik.